

SOEKARNO DALAM PERJALANAN SEJARAH BANGSA¹

Oleh Asvi Warman Adam²

Buku ini diterbitkan ulang pada waktu yang tepat, tahun 2005 ketika Indonesia merayakan peringatan 60 tahun kemerdekaannya. Saat ini pula saat yang tepat mengingat bahkan melihat kembali peran Soekarno dalam sejarah perjuangan bangsa. Apakah pemikirannya masih relevan dalam situasi negeri yang ditimpa krisis berkepanjangan dan dihempas badai utang serta dalam kondisi internasional yang kurang menguntungkan dunia ketiga?

Tahun 2005 adalah tahun paling bersejarah. Kita akan memperingati beberapa peristiwa besar yang pernah terjadi dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara yaitu 60 tahun proklamasi, 50 tahun KAA Bandung, 40 tahun tragedi nasional 1965 dan 30 tahun kasus Timor Timur.

Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 merupakan batas waktu bahwa kita telah memasuki zaman baru, tidak lagi terjajah tetapi sudah dipimpin oleh bangsa sendiri. Sepuluh tahun kemudian (1955) kita berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika di Bandung. Ini merupakan prestasi bidang internasional yang sangat signifikan karena menempatkan Indonesia sebagai negara dunia ketiga yang terpandang di dunia. Siapa menyangka satu dekade kemudian terjadi tragedi nasional yang terbesar dalam sejarah Indonesia. Tanggal 30 September 1965 meletus G30S yang dampak dan sakitnya (bagi korban dan keluarganya) masih terasa sampai sekarang. Tahun 1975 tentara Indonesia memasuki Timor Timur dan kemudian daerah itu menjadi propinsi Indonesia yang ke-27 dan tahun 1999 wilayah itu lepas kembali menjadi sebuah negara merdeka, Timor Leste.

Setelah 60 tahun merdeka, perdebatan tentang siapa yang lebih berperan dalam mencetuskan proklamasi: para pemuda atau pemimpin yang lebih senior seperti Soekarno, Hatta dan Soebardjo, sudah menjadi klise. Apakah kita merdeka berkat perjuangan sendiri atau suatu insidensi sejarah, kini tidak begitu relevan. Jauh lebih penting untuk melihat faktor apa yang menyebabkan kita masih eksis dan bersatu seperti sekarang. Apa kekuatan yang mendalam dan luar biasa (Jean-Baptiste Duroselle³ menyebutnya *force profonde*) yang menyebabkan kita bertahan sebagai bangsa? Mengapa RIS (Republik Indonesia Serikat) hanya mampu bertahan setahun, setelah itu kenapa semuanya ingin kembali bersatu dalam wadah Republik Indonesia. Mengapa rakyat Aceh mau menyumbang pesawat terbang Seulawah bagi Republik Indonesia? Kenapa rakyat Sumatera Barat rela mengumpulkan iuran bagi republik yang masih muda usia ketika itu? Kenapa ribuan warga kota Surabaya rela mengorbankan jiwa-raganya melawan kembalinya penjajah?

Ada seorang sosiolog⁴ yang mengibaratkan ikrar sumpah pemuda 28 Oktober 1928 sebagai terciptanya ruh bangsa ini. Ruh ini kemudian masuk ke dalam raga/tubuh bangsa Indonesia yang lahir tanggal 17 Agustus 1945. Tetapi tentu prosesnya tidak sesederhana itu.

Jadi kini saatnya untuk mengkaji kembali faktor apa yang menjadi pengikat bangsa (faktor integratif) dan faktor apa pula yang memecah belah (faktor disintegratif). Menurut pengamatan saya, paling sedikit ada tiga unsur kekuatan yang menjadi aset bangsa tetapi sekaligus dapat memecah persatuan bangsa yaitu a) TNI, b) kelompok Islam (garis keras) dan

¹ Kata Pengantar untuk cetak ulang buku *Di Bawah Bendera Revolusi*, Jakarta: Yayasan Bung Karno, 2005.

² Ahli Peneliti LIPI

³ Jean-Baptiste Duroselle, *Tout Empire Périra, Une Vision Théorique des Relations Internationales*, Paris: Publications de la Sorbonne, 1981

⁴ Iwan Gardono Sudjatmiko, "Sumpah Pemuda dan nasionalisme", *Suara Pembaruan*, 28 Oktober 2003

supremasi Jawa (baik budaya maupun entitas keseluruhannya) terhadap luar Jawa. Selain itu ada pula kelompok masyarakat yang masih mengalami diskriminasi dalam kehidupan berbangsa. Yang pertama merupakan kelompok yang sesungguhnya dapat menjadi ujung tombak perekonomian nasional yaitu etnis Tionghoa. Yang kedua, korban tragedi 1965 beserta keluarga yang masih mengalami stigma buruk oleh pemerintah dan masyarakat karena belum dicabutnya berbagai peraturan yang membuat mereka menjadi warga negara kelas dua. Secara eksternal terdapat faktor lain yang senantiasa membuat bangsa ini tidak sederajat dengan bangsa lain adalah soal utang yang seharusnya dapat diselesaikan dengan cara yang tepat.

Konferensi Asia Afrika tahun 1955 merupakan salah satu tonggak prestasi bangsa kita dalam bidang politik luar negeri. Bandung menjadi tempat konferensi sekaligus simbol kebangkitan bangsa-bangsa terjajah seperti terlihat terlihat pada judul buku seorang pakar Perancis⁵ “*Bandoeng et le reveil des peuples colonisés*” yang ditulis tahun 1961 dan menjadi buku teks bagi mahasiswa. Persaingan dan konflik sino-soviet juga melatar belakang konferensi ini.

Namun siapa dapat menduga, dalam tempo sepuluh tahun, Indonesia yang menjadi kampiun negara non-blok itu kemudian berbalik arah, setelah meletus peristiwa G30S. Percobaan kudeta yang gagal itu menimbulkan dampak besar dan mendalam pada bangsa ini. Tragedi berdarah 1965/1966 memakan korban paling sedikit setengah juta nyawa di Jawa/Bali dan Sumatera, sesuatu yang dinafikan dalam pendidikan sejarah di sekolah. Peristiwa itu merupakan *watershed*, penanda batas perubahan total dalam bidang politik, ekonomi dan sosial-budaya yang berlangsung secara serempak. Ekonomi dipimpin menjadi ekonomi pasar. Politik dalam dan luar negeri menjadi pro-Barat antara lain karena ketergantungan terhadap bantuan asing. Secara sosial-budaya semua aktivitas dikerahkan dari atas agar menjadi pendukung pembangunan ekonomi.

Tahun 1975 terjadi kasus Timor Timur. Kita bisa menyebutnya sebagai integrasi atau invasi Indonesia ke Timor Timur. Tetapi yang jelas telah timbul korban demikian banyak dalam proses bersatunya kedua entitas teritorial. Robert Cribb telah membandingkan korban yang jatuh tahun 1965 dengan penyerbuan tahun 1975 ke Timor Timur serta yang terjadi kemudian.

Peringatan bersejarah tahun 2005 itu bisa terfokus kepada salah satu aspek yang disebutkan di atas, tergantung kepada kepentingan, selera dan dana yang dimiliki penyelenggara. Departemen Luar Negeri kabarnya akan mengadakan seminar besar-besaran mengenai KAA Bandung. Tetapi seyogianya seluruh peristiwa itu dikaji secara menyeluruh (holistik), tidak sepotong-sepotong. Dua peristiwa pertama memang menumbuhkan harapan, sedangkan dua peristiwa terakhir mendatangkan duka, tetapi peristiwa pahit itu juga perlu diingat kalau bangsa kita mau belajar dari sejarah.

KAA Bandung seyogianya disandingkan dengan peristiwa Timor Timur tahun 1975. Bandung merupakan simbol kebangkitan bangsa terjajah, tetapi tahun 1975 bangsa yang terjajah itu juga ikut menjajah ? Ini tergambar dengan ironis dalam artikel Peter Carey pada jurnal *Indonesia* yang terbit di Cornell yaitu tentang apa yang disebutnya sebagai “neokolonialisme dunia ketiga”. Dunia ketiga yang dulu terjajah kini menjadi kolonialis baru ? Itulah Indonesia yang dengan kelebihan dan kelemahannya tetap kita cintai. Sebagai sebuah bangsa yang ingin menuju masa depan yang lebih baik, kita perlu belajar dari pengalaman dan sejarah masa lalu. Kita perlu membaca ulang pemikiran para *founding fathers* Indonesia.

⁵ Odette Guitard, *Bandoeng et le reveil des peuples colonisés*, Paris: Presses Universitaires de France, 1961

Soekarno Muda

Buku ini memuat 61 tulisan Bung Karno yang ditulis sejak tahun 1926 sampai dengan tahun 1941 dan merupakan pemikiran puncak Soekarno muda sebelum Jepang mendarat di Indonesia. Masa 15 tahun itu cukup menentukan dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Bernard Dahm⁶ membagi periode perjuangan Soekarno era 1926-1941 ini menjadi tiga tahap yaitu pertama tahap nasionalis (1926-1931), tahap Marhaen/Marxis 1932-1933 dan tahap Islam (1934-1941)

Soekarno telah gemar menulis sejak duduk di bangku HBS di Surabaya. Namun penyunting buku ini belum menemukan tulisan Soekarno antara tahun 1917 sampai dengan 1925. Tentu semua yang termuat dalam buku ini bukan seluruh tulisan yang pernah dikarang oleh Soekarno. Buku ini pertama kali diterbitkan tanggal 17 Agustus 1959 setelah panitia bekerja selama lima tahun mengumpulkan tulisan yang tersebar di mana-mana.

Kumpulan tulisan itu masih dalam ejaan lama, dan Soekarno sendiri yang memberi judul "*Di Bawah Bendera Revolusi*". Tulisan yang pertama adalah mengenai Nasakom yang ditulis tahun 1926 dalam *Suluh Indonesia Muda*. Entah kebetulan atau tidak, tampaknya pemuatannya sejalan dengan irama zaman saat itu (tahun 1959), ketika Soekarno mulai menjalankan apa yang disebutnya sebagai demokrasi terpimpin. Untuk mencapai persatuan bangsa dibutuhkan pula kebersamaan antara kelompok penganut ideologi besar di tanah air yaitu Nasionalis, agama (Islam) dan komunis. Tulisan yang terakhir berbentuk tulisan tangan mengenai peran guru dalam pembangunan bangsa. Meskipun mengacu kepada Taman Siswa, pernyataan Soekarno dalam tulisan ini relevan sampai sekarang dalam kaitannya dengan kehidupan dan peran pendidik secara khusus dan pembangunan karakter bangsa secara umum.

Menurut Dahm, kreativitas Soekarno sebagai pemikir tentang nasionalisme dan penentang kolonialisme memuncak tahun 1926-1927. Tahun 1930-an ia lebih banyak di belakang layar, karena ia dibuang ke Flores dan Bengkulu. Ketika Jepang datang, ia ditunjuk sebagai pemimpin nasional.

Menurut Bernard Dahm ada dua karakter yang menonjol pada Soekarno yaitu pemersatu ulung dan anti-imperialis yang militan. Soekarno mulai dulu dengan persatuan. Setelah ini diupayakan barulah ia melakukan perjuangan menghadapi penjajah (antara lain dengan dikotomi kulit putih dan kulit warna), dengan kata lain ia siap melakukan perang baratayuda. Buku ini menggambarkan konsistensi pemikirannya sejak tahun 1920-an. Dari segi pemikiran, masa pasca proklamasi hanya sekedar kelanjutan dari periode puncak pemikiran pendiri bangsa ini tahun 1920-an.

Bagaimana Dahm menilai pemikiran atau cara penyampaian gagasan Bung Karno ? Di samping menyampaikan kritik kepada Soekarno yang kadang-kadang mengutip gagasan tokoh lain secara keliru atau di luar konteks di mana sesuatu dibicarakan, Dahm mengungkapkan kelebihan sang tokoh yang kemudian menjadi proklamator. Menurut pakar Jerman yang menulis disertasi tentang presiden Republik Indonesia yang pertama tahun 1964, Soekarno memanfaatkan tradisi budaya Indonesia baik berupa dunia wayang maupun kepercayaan akan datangnya Ratu Adil. Meskipun ia tidak berusaha meyakinkan rakyat bahwa ialah sang Ratu Adil itu, tetapi tindak-tanduknya dan desas-desus serta harapan yang disebabkan kepadanya, membentuk kepercayaan rakyat bahwa ia memiliki kemampuan luar biasa. Lebih belakangan, Soekarno menjelaskan tentang konsep Ratu Adil tersebut. Di dalam sidang BPUPKI tahun 1945, ia berpidato "Apakah yang dimaksud dengan Ratu Adil. Yang dimaksud dengan paham ratu Adil adalah *sociale rechvaardigheid*" Rakyat ingin sejahtera. Rakyat ingin menciptakan dunia yang di dalamnya ada keadilan, di bawah pimpinan Ratu

⁶ Bernard Dahm, *Soekarno dan Perjuangan Kemerdekaan*, Jakarta: LP3ES, 1987

Adil. Maka oleh karena itu kalau kita memang betul-betul mengerti, mengingat, mencintai Rakyat Indonesia marilah terima *sociale rechvaardigheid* ini". Kesejahteraan yang berkeadilan ini yang didambakan rakyat.

Ia mampu menjelaskan usaha kemerdekaan dengan bahasa mitos Jawa yang mudah dipahami oleh rakyat kecil sekalipun. Selain itu ia berupaya terus menerus menggalang kesatuan di antara kelompok-kelompok yang bersaing di dalam sebuah partai atau kerjasama damai di antara partai yang memiliki tujuan berbeda. Upaya menciptakan persatuan ini merupakan perwujudan dari sinkretisme Jawa tradisional. Bahkan Nasakom dapat dilihat dalam kerangka politik ini yang sudah dimulai Soekarno dengan gagasan pembentukan "Permufakatan Partai Politik Kebangsaan Indonesia tahun 1920-an, yaitu koalisi antara partai-partai nasionalis, keagamaan dan sosialis waktu itu.

Soekarno memulai kariernya dengan tulisannya yang sangat penting "Nasionalisme, Islam dan Marxisme". Tulisan ini sempat diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan diterbitkan oleh Cornell University dengan pengantar oleh Ruth McVey. Namun karier Soekarno tahun 1965/1966 juga berakhir karena ia mempertahankan konsep "Nasionalisme, Agama dan Komunisme". Ia ditumbangkan dengan alasan tidak mau mengutuk PKI sebagai dalang G30S.

Beberapa minggu sebelum ia dijatuhkan dari kedudukan Presiden, Bernard Dahm sempat mewawancarai Bung Karno, "Mengapa Bung tidak membubarkan PKI?" "Kita tidak dapat menghukum suatu partai secara keseluruhan karena kesalahan beberapa orang". Soekarno tidak berubah, ia tetap pada pendiriannya yaitu: Memerangi imperialisme sampai akhir dan membangun tatanan baru dengan melebur ideologi-ideologi yang berbeda menjadi keseluruhan yang harmonis.

Masalahnya, menurut Dahm, ketiga ideologi ini saling bertentangan. Sedangkan bagi Soekarno, nasionalisme harus dapat menyediakan tempat bagi Islam dan kaum Marxis dan sebaliknya Islam juga harus bekerjasama dengan nasionalis dan Marxis. Pertentangan antara agama dengan Marxisme dikesampingkan Soekarno dengan menerima materialisme historis dan menolak falsafah materialis.

Menurut Harry Benda, Soekarno begitu yakin kepada Nasakom. Sejak hari-hari pertama sebagai aktivis politik Soekarno bersikeras bahwa nasionalisme, Islam dan Marxisme adalah satu. Sudah tentu tidak demikian kenyataannya, kata Benda. Hal ini terlihat dalam perdebatan yang sengit pada Konstituante antara golongan Islam dengan kelompok lainnya yang dapat mengarah kepada perang saudara.

Sedangkan sejarawan Onghokham mempertanyakan lebih jauh tentang maksud Bung Karno? Apakah ia sekedar menganjurkan ketiga gerakan (nasionalisme, agama dan komunisme) bekerjasama atau harus terjadi kesatuan antara ketiga ideologi ini? Onghokham menduga bahwa tahun 1920-an pemikiran Soekarno lebih menekankan front nasional atau front anti penjajahan ketimbang jiwa Nasakom atau Nasamar pada saat ia berkuasa penuh tahun 1960. Front nasional atau front populer dari ketiga gerakan itu menurut Ong termasuk "inovasi politik" sedangkan jiwa Nasakom agak berbau sinkretisme.

Sinkretisme Jawa melihat nasionalisme, Islam dan Marxisme adalah satu, sebab ketiga unsur ini melawan kolonialisme dan imperialisme barat. Yang penting dalam sinkretisme itu adalah persatuan dan bukan pertentangannya. Jadi bagi ketiga aliran, terdapat musuh bersama yaitu kolonialisme dan imperialisme. Pendekatan sinkretisme ini juga terlihat dalam perumusan Pancasila.

Ong melengkapi pendekatan budaya yang dilakukan Dahm dengan mengatakan bahwa penilaian terhadap Soekarno tidak dapat dilepaskan dari politik dan zamannya. Sebagai pemimpin bangsa ia mesti rasional, namun sebagai pahlawan tentu ia memiliki emosi dan unsur budaya yang menonjol. Kedua aspek ini dalam kehidupan Soekarno mengalami pasang naik dan pasang surut. Menurut Onghokham, dalam tulisan-tulisan Soekarno memang

kadang-kadang disebut tentang unsur kejayaan dalam sejarah lampau bangsa ini tetapi Soekarno lebih menonjolkan penderitaan dan eksploitasi penjajah terhadap bangsa kita (nasib bersama yang sengsara). Untuk keluar dari kesengsaraan itu diperlukan jembatan emas yaitu kemerdekaan yang akan mengantar bangsa ke gerbang kehidupan yang lebih baik.

Meskipun demikian terdapat pula kritik terhadap Soekarno yang sangat menonjolkan nasionalisme dan kurang awas terhadap fasisme, yaitu ideologi yang mengagungkan negara dan bangsa dan memberikan negara kekuasaan untuk mengontrol seluruh aspek kehidupan nasional. Militarisme bisa membonceng pada fasisme.

Apakah Soekarno pemikir atau politikus? tanya Onghokham. Ketika Soekarno muda menulis Nasakom tahun 1926, ia adalah seorang pemikir, tetapi ketika Soekarno tua menerapkan Nasakom dalam kehidupan politik setelah tahun 1959, ia bertindak sebagai seorang politikus.

Orang bisa saja menyalahkan Soekarno yang dinilai menghambat pertumbuhan demokrasi tahun 1959-1965. Kritik boleh saja ditujukan terhadap demokrasi terpimpin. Namun seyogianya masalah ini tidak dilihat hitam-putih seperti yang dilakukan para era Orde Baru. Demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin itu memiliki kelebihan dan kekurangannya, tetapi perlu diingat bahwa yang satu merupakan kelanjutan daripada yang lain, untuk tidak mengatakan bahwa yang satu adalah akibat dari yang lain. Suatu saat demokrasi yang lebih menonjol, tetapi pada saat lain nasionalisme yang lebih mengemuka. Tetapi apakah nasionalisme dan demokrasi itu merupakan suatu dikotomi, bukankah keduanya dapat berjalan seiring? Demokrasi terpimpin kemudian berlanjut dengan Orde Baru. Terlepas dari pro dan kontra, pada era Orde Baru ada yang mengatakan bahwa telah terjadi defisit demokrasi dan defisit nasionalisme. Terlepas dari segi kekuatan dan kelemahannya, yang jelas semua yang disebutkan di atas adalah periode-periode dalam sejarah perjalanan panjang sebuah bangsa yang berhubungan satu sama lain bertali-temali (yang harus ditulis kembali).

Gagasan yang masih relevan

Tahun 1970 Soekarno dibunuh dua kali, demikian menurut sejarawan Perancis Jacques Leclerc. Selama tiga dekade penggantinya menambah beban utang sekian kali lipat dan memperluas wilayah Indonesia (yang akhirnya lepas kembali tahun 1999). Tetapi tahun 1999 wajah Soekarno muncul di mana-mana di seluruh Indonesia dan rakyat memilih partai yang berada di balik nama besar Bung Karno. Tetapi kenapa sejalan dengan perkembangan waktu, pilihan itu kemudian berubah? Tentu ada sebab lain. Namun Bung Karno tetap abadi di hati rakyat Indonesia.

Tulisan-tulisan Soekarno ini masih relevan dengan kondisi sekarang karena inti dari gagasannya adalah persatuan bangsa. Itu belum terwujud sebagaimana yang diharapkan. Sampai sekarang kita masih perlu membangun bangsa dan membangun karakter bangsa (*nation dan character building*). Ini tugas yang belum selesai. Itulah yang diperjuangkan Soekarno sejak masa mudanya sampai akhir hayatnya. Bahkan ia “menebus” persatuan itu dengan kehilangan kekuasaan dan bahkan kehidupannya.

Tulisan terakhir dalam buku ini tentang peran guru di masa kebangunan. “Di masa kebangunan ini maka tiap-tiap orang harus menjadi guru, menjadi pemimpin”. Guru dan pemimpin itu sangat dibutuhkan untuk membangun karakter bangsa. Dalam membangun karakter, bangsa Indonesia perlu belajar sejarah⁷ tetapi secara dinamis. “Jikalau kita mempelajari dan mengagumi Sriwijaya dan Mataram dan Majapahit dan Banten dan Melayu dan Singasari, tetapi kita tidak menangkap dan meneruskan api yang bernyala-nyala dan

⁷ Pidato Soekarno tanggal 17 Agustus 1966 berjudul *Jas Merah (Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah)*. Pada kesempatan ini ia menegaskan mandat yang diterimanya adalah “Membangun Bangsa (*Nation Building*) dari kemerosotan zaman kolonial untuk dijadikan satu bangsa yang berjiwa, yang dapat dan mampu menghadapi semua tantangan—satu bangsa yang merdeka dalam abad ke-20 ini”.

berkobor di dalam jiwa-Sriwijaya, jiwa-Mataram, jiwa-Majapahit, jiwa-Banten, jiwa-Melayu itu, maka kita pun hanya mewariskan abu saja, mewariskan barang yang mati, mewariskan barang yang tiada harga.”

Gagasan Bung Karno tentang trisakti⁸: berdaulat dan bebas dalam politik, berdikari dalam ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan sangat penting untuk dikaji ulang. Mengenai ekonomi misalnya, Bung Karno pernah berteriak “*Go to hell with your aid !*” Ketika dijatuhkan dari kekuasaan, negara kita memiliki utang 2,5 milyar USD. Namun ketika presiden penggantinya “lengser” tahun 1998, utang (pemerintah dan swasta) yang diwariskannya kepada bangsa Indonesia meningkat sebanyak 6000 % yaitu 150 milyar USD. Kini pembangunan Indonesia terganjal oleh utang. Sebagian besar anggaran negara setiap tahunnya harus disisihkan untuk membayar utang dan bunganya. Padahal tahun 1927 di Paris mantan Menteri Keuangan Rusia Alexander Sack telah menyampaikan teori “Utang Najis” (*odious debt*). Pada prinsipnya rezim pemerintahan yang baru meneruskan atau membayar utang yang telah dibuat oleh pemerintah terdahulu. Namun klausul ini batal bila rezim yang terdahulu adalah rezim otoriter yang korup sehingga utang itu tidak digunakan untuk rakyat melainkan dikorup oleh pejabat pemerintah. Kita tahu dan sudah mendengar bahwa telah terjadi 30 % kebocoran pada pembangunan selama 30 tahun Orde baru, seperti sering dikemukakan oleh Prof Dr Sumitro Djojohadikusumo. Jadi kita sebetulnya dapat mengklaim bahwa utang yang dibuat oleh pemerintah Orde Baru itu sebagai utang najis dan karena itu kita seharusnya mendapat penghapusan atau pemotongan utang bukan sekedar *moratorium* (penangguhan pembayarannya).

Tulisan-tulisan Soekarno mengenai Islam antara lain berupa polemiknya dengan A. Hasan dari Bandung sangat berguna untuk masa sekarang. Soekarno memperlihatkan sikap moderat dalam beragama. Ia menolak tabir atau pembatas tempat duduk antara lelaki dan perempuan dalam suatu pertemuan misalnya. Ketika belakangan ini muncul kembali wacana tentang negara Islam bahkan lebih jauh lagi kekhalifahan Islam seperti dicanangkan oleh Hizbuttahrir, maka terlihat betapa relevan pandangan Soekarno tentang Islam. Soekarno menginginkan Islam yang modern tetapi bukan radikal. Hal itu telah dicatat dalam sejarah bangsa kita bahwa Soekarno dan *founding fathers* lainnya secara arif dan bijaksana memutuskan dasar negara Pancasila dan UUD 1945 serta mengadopsi Piagam Jakarta sebagai jiwa dari UUD 1945. Namun menolak pencantuman secara eksplisit kewajiban menjalankan syariat Islam di dalam konstitusi negara.

Di luar dari paparan di atas, jangan lupa bahwa Soekarno telah menyumbangkan sesuatu yang sangat berharga bagi bangsa ini –mudah-mudahan-- sepanjang masa yaitu pemikiran tentang Pancasila. Inilah dasar bagi kehidupan kita berbangsa dan bernegara.

Akhirnya, pengantar ini ditutup dengan pernyataan bahwa kita membutuhkan nasionalisme baru, untuk menghadapi ancaman baru, krisis dalam negeri yang multidimensi, tantangan globalisasi yang semakin besar, situasi regional dan internasional yang berubah cepat. Dengan semangat baru itu pulalah kita baca ulang buku “Di Bawah Bendera Revolusi” ini. ***

⁸ Susilo Bambang Yudhoyono, “Trisakti Bung Karno” dalam Jusuf Isak (ed), *100 Tahun Bung Karno*, Jakarta: Hasta Mitra, 2001